

ABSTRAK

Ainul Mustofa. *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin dalam Menanggulangi Politik Identitas Agama pada Pemilu 2024.* Skripsi, Pembimbing: Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.SI., pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Peran, FKUB, Politik Identitas Agama, Pemilu 2024

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan dilatarbelakangi isu politik identitas agama yang sering muncul menjelang pemilu, bahkan hingga pemilu berlangsung. Tahun 2024 diadakan pemilu presiden-wakil presiden, legislatif, hingga pemilihan kepala daerah, termasuk di Kota Banjarmasin. Isu politik identitas agama juga sering kali muncul di Kota Banjarmasin sehingga ancaman polarisasi ini dinilai harus diantisipasi oleh pihak terkait, khususnya FKUB Kota Banjarmasin selaku organisasi kerukunan umat beragama.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau *field research* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin dan wawancara dengan dilakukan selama bulan Oktober 2023—Januari 2024 dengan 7 (tujuh) informan yang merupakan pengurus FKUB Kota Banjarmasin. Peneliti menggali data-data terkait pengetahuan informan tentang politik identitas agama dalam menghadapi politik identitas agama pada Pemilu 2024.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran FKUB Kota Banjarmasin tidak masuk kedalam proses politik pemilu, misalnya mengintervensi atau menghentikan kampanye calon atau partai yang dianggap menggunakan politik identitas agama. FKUB Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi dengan peserta pemilu, kalangan kampus, dan masyarakat umum tentang pemilu yang damai dan bermartabat tanpa politik identitas agama yang merusak. Masalah FKUB Kota Banjarmasin dalam menanggulangi politik identitas agama pada Pemilu 2024 berupa komitmen banyak pihak termasuk peserta pemilu dan masyarakat yang sudah mendengarkan himbauan dari FKUB agar menghindari politik identitas agama masih kurang konsisten. Saat sosialisasi mereka tampaknya sepakat bahwa politik identitas itu buruk, tetapi di lapangan mereka bisa saja mempraktikkannya.